

# PERTAHANAN LITORAL DIHADAPKAN PADA KEBERADAAN ALKI YANG MEMBELAH DI TENGAH GUGUS KEPULAUAN INDONESIA

**Joeliherman**

Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut

<http://doi.org/10.52307/jmi.v912.190>

## **Abstrak**

Konsep pertahanan litoral dipahami sebagai serangkaian operasi pertahanan yang berfokus pada pengelolaan ruang perairan di sekitar wilayah pesisir, di mana kekuatan daratan dapat memengaruhi situasi maritim. Dengan luas wilayah perairan yang signifikan, Indonesia dihadapkan pada tantangan keamanan akibat meningkatnya intensitas pelayaran kapal asing melalui ALKI, yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan stabilitas keamanan negara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber ilmiah terkait. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kemampuan TNI, integrasi antar matra, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan maritim merupakan strategi kunci dalam menghadapi ancaman yang muncul. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem deteksi dan respons cepat serta kolaborasi antara Pemerintah, TNI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman. Melalui strategi yang komprehensif dan responsif, Indonesia dapat menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah lautnya, sekaligus berkontribusi pada stabilitas keamanan regional.

**Kata Kunci :** ALKI, Kedaulatan Negara, Pertahanan Litoral.

## **Abstract**

*The concept of littoral defense is understood as a series of defense operations that focus on managing the waters around the coastal area, where land power can influence the maritime situation. With a significant area of waters, Indonesia is faced with security challenges due to the increasing intensity of foreign ship voyages through ALKI, which has the potential to disrupt the sovereignty and stability of state security. Using a qualitative approach with an analysis of various laws and regulations and related scientific sources. The findings show that strengthening the TNI's capabilities, integration between dimensions, and increasing public awareness of the importance of maritime security are key strategies in dealing with emerging threats. This study recommends the development of a rapid detection and response system and collaboration between the Government, TNI, and the community to create a safe maritime environment. Through a*

*comprehensive and responsive strategy, Indonesia can maintain the sovereignty and security of its maritime territory, while contributing to regional security stability.*

**Keywords :** ALKI, State Sovereignty, Littoral Defense.

## PENDAHULUAN

Konsep pertahanan litoral awalnya dipahami sebagai proyeksi kekuatan laut menuju daratan. Namun seiring perkembangan zaman, perspektif terhadap konsep ini mengalami perubahan, di mana pertahanan litoral dapat bermakna sebaliknya dimana kekuatan dari darat juga dapat mempengaruhi situasi di laut.<sup>1</sup> Dengan demikian pertahanan litoral dapat diartikan sebagai serangkaian operasi pertahanan yang dilakukan di wilayah pesisir, berfokus pada pengelolaan ruang perairan di sekitarnya. Dalam konteks ini, area perairan di sekitar pantai dianggap memiliki nilai strategis yang sangat penting untuk pertahanan. Kekuatan pertahanan suatu negara yang berorientasi pada daratan dapat memiliki kemampuan strategis untuk menjangkau perairan, guna mengatasi berbagai potensi ancaman yang dapat

mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan pertahanan litoral memadai guna menjamin tegaknya kedaulatan di seluruh wilayah, termasuk di perairan.

Sebagai negara kepulauan, berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* tahun 1982 (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 46 hingga 53 untuk memberikan akses laut bagi perlintasan kapal (niaga maupun perang) negara lain yang melakukan pelayaran menuju wilayah tertentu.<sup>2</sup> Diimplementasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 37 Tahun 2002 Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut

---

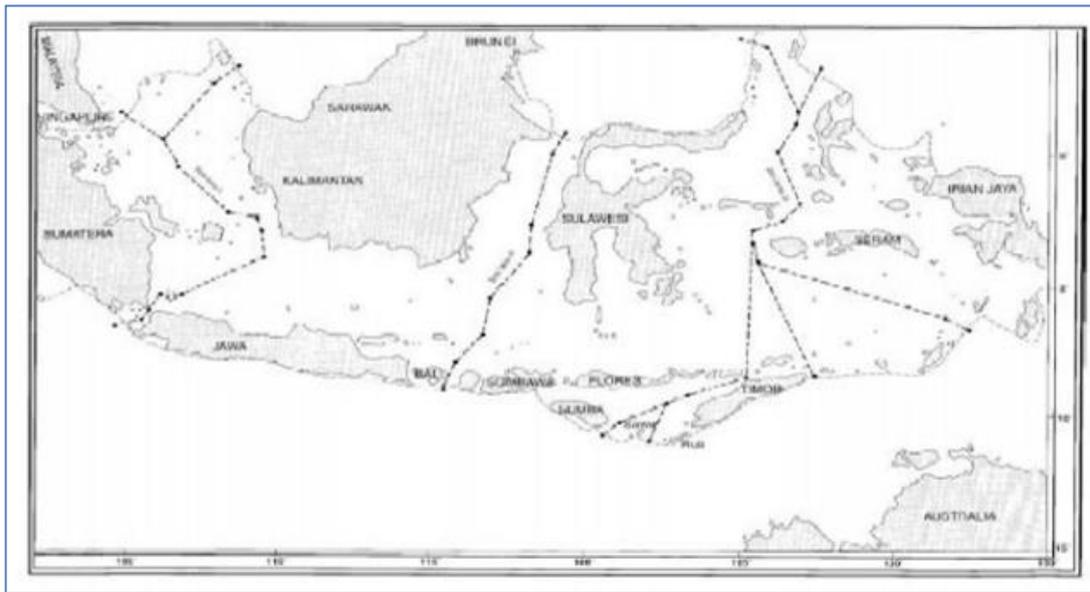
<sup>1</sup> Mankowski, R., (2023) *What is Littoral Manoeuvre?*, Australiaarmyresearchcentre.com, <https://researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/>. Diakses 13 Maret 2025 Pukul 23.00 WIB

---

<sup>2</sup> Budiman, A. (2010), *Pembinaan Wilayah Negara Untuk Kepentingan Pertahanan*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=16&mnorutisi=5>. Diakses 13 Maret 2025. Pukul 23.15 WIB

Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. PP ini juga juga memberikan penyempurnaan mengenai daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Akses ini kita kenal dengan nama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Terhadap

UNCLOS 1982, Pemerintah meratifikasi dalam UU RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).



Gambar 1. Jalur ALKI Berdasar PP RI Nomor 37 Tahun 2002  
Sumber : IMO, 2010

Bentang gugus kepulauan Indonesia, menyebabkan negeri ini wajib menetapkan beberapa ALKI (lihat gambar 1) untuk memfasilitasi negara asing dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka saat melintasi gugus kepulauan Indonesia. Negara-negara yang ingin melintasi jalur-jalur ini diwajibkan untuk mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dibukanya ALKI dengan intensitas pelayaran internasional padanya memberikan dampak tertentu bagi Indonesia. salah satu yang menjadi

perhatian adalah potensi kerawanan pertahanan. Karenanya Indonesia harus memiliki konsep pertahanan memadai guna mengeliminasi kemungkinan kerawanan yang terjadi. Atasnya, konsep pertahanan litoral yang ideal dapat menjadi sebuah solusi.

Demi membedah tentang hal di atas, penelitian dengan judul **Pertahanan Litoral Dihadapkan Pada Keberadaan Alki Yang Membelah Di Tengah Gugus Kepulauan Indonesia** dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis konsep pertahanan litoral dihadapkan dengan keberadaan ALKI. Sumber utama data yang digunakan mencakup berbagai aturan perundangan, naskah ilmiah, dan sumber bacaan lain yang relevan. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan ALKI dan pertahanan. Selain itu, kajian ilmiah yang mencakup artikel jurnal, disertasi, dan laporan penelitian sebelumnya akan digunakan untuk memahami dinamika pertahanan litoral dan implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, di mana informasi diorganisir dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang relevan. Analisis dokumen juga diterapkan untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan ALKI. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi sesuai dengan relevansinya terhadap pertahanan litoral, serta menganalisis dampak kebijakan ALKI terhadap keamanan maritim Indonesia dan

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertahanan litoral di tengah keberadaan ALKI.

## PEMBAHASAN

Indonesia, merupakan negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia. Gugus kepulauan yang membentuk Indonesia membentang sekitar 8,567 juta km<sup>2</sup>. Luas daratannya adalah 1.913 km<sup>2</sup> dan luas perairannya mencapai 6.654 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Area luas ini meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengelilingi seluruh wilayah daratan/kepulauan yang berbatas perairan. Mengacu pada UNCLOS 1982 dan UU RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), wilayah Indonesia

---

<sup>3</sup> Hadza, B., (2023), *Luas dan Letak Wilayah Indonesia Berdasarkan Peta, Yuk Simak*, Detik.com, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7069496/luas-dan-letak-wilayah-indonesia-berdasarkan-peta-yuk-simak>, Diakses 16 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB.

merupakan satu kesatuan utuh. Meski demikian, demi kepentingan seluruh bangsa di dunia, aturan tersebut mewajibkan Indonesia memberikan akses bagi negara lain untuk melintasi Indonesia. Akses ini merupakan jalur internasional yang oleh Pemerintah RI disebut dengan ALKI.

Sebagai jalur internasional, setiap kendaraan (baik udara maupun laut), dapat memaluinya tanpa harus meminta ijin kepada Indonesia. Pemerintah, atas dasar luasnya bentang gugus kepulauan yang membentuk Indonesia, menetapkan 3 buah ALKI. Secara detail Pasal 11 PP RI Nomor 37 Tahun 2002 menetapkannya; ALKI I (dari Utara) memiliki 2 pintu akses, masing-masing di sisi barat dan timurgugur kepulauan yang membentuk Kabupaten Natuna, Selat Karimata (di sisi timur Pulau Belitung), sisi barat Laut Jawa dan berakhir di selatan Selat Sunda; ALKI II, barat Laut Sulawesi (sisi timur Pulau Kalimantan), Selat Makassar, sisi timur Laut Jawa, Laut Bali dan berakhir di selatan Selat Bali; ALKI III terdiri dari banyak percabangan dimulai akses utara pada Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, kemudian bercabang masing-masing: Selat Ombai, Laut Sawu, barat Pulau

Sumba; Selat Ombai, Laut Sawu, timur Pulau Sumba; Selat Leti, dan; Laut Arafura (tergantung rute perjalanan masing-masing kendaraan asing).

Kondisi ini membuat berbagai kendaraan dari negara asing dapat dengan bebas melintas di tengah gugus kepulauan Indonesia yang atasnya memberi potensi dampak tertentu termasuk bagi pertahanan dan keamanan. Dengan dibukanya akses ini, intensitas pelayaran kapal asing di perairan Indonesia meningkat, yang dapat menimbulkan risiko terhadap kedaulatan negara. Kapal-kapal yang melintasi ALKI tidak hanya terdiri dari kapal niaga, tetapi juga kapal perang dari negara lain. Hal ini berpotensi menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, di mana keberadaan kapal asing dapat mengganggu stabilitas keamanan maritim.

Salah satu potensi kerawanan lain yang muncul adalah ancaman terhadap aktivitas penyelundupan dan kejahatan lintas batas. Dengan banyaknya kapal yang melintas, sulit bagi otoritas Indonesia untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas di perairan tersebut. Keberadaan ALKI yang memfasilitasi pelayaran

internasional dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan barang atau manusia. Ini menjadi tantangan serius bagi aparat keamanan untuk menjaga integritas dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, kerawanan juga muncul dari kemungkinan terjadinya konflik antara kapal asing dan kapal Indonesia. Dalam situasi di mana kapal asing melanggar batas wilayah atau melakukan aktivitas yang merugikan, konflik dapat terjadi. Hal ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik yang dapat merugikan posisi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani insiden semacam ini untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Keberadaan ALKI juga dapat mempengaruhi keamanan sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Dengan akses yang lebih mudah bagi kapal asing, potensi eksploitasi sumber daya alam, seperti perikanan, semakin meningkat. Kapal asing dapat mengambil keuntungan dari kekayaan laut Indonesia tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi ekonomi lokal. Situasi ini menuntut

Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan untuk melindungi sumber daya alamnya dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan Teori Kedaulatan Negara yang telah digunakan berabad-abad dengan tiga tokoh penting atanya, Thomas Hobbes, Jean Bodin, dan George Jellinek. Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mengembangkan teori Kedaulatan Negara dalam karyanya yang terkenal, "*Leviathan*" (1651). Menurut Hobbes, manusia hidup dalam kondisi alamiah yang keras, brutal, dan konflik karena persaingan sumber daya dan kekuasaan. Untuk mengatasi kekacauan ini, manusia membentuk pemerintahan dan mendirikan negara. Hobbes menyatakan bahwa individu-individu bersedia menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka kepada pemerintah (negara) melalui suatu kontrak sosial. Dalam kontrak ini, individu-individu setuju untuk mematuhi aturan dan hukum negara agar mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kedaulatan yang mutlak untuk menjaga ketertiban dan

melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal.<sup>4</sup>

Jean Bodin adalah seorang pakar luar biasa tentang negara bagian dan hukum negara Perancis, yang juga sangat dipengaruhi oleh negara-negara Renaisans selama tahun 1530-1596. Dalam bukunya *Les Six Livres de République* Bodin menyampaikan Negara adalah keseluruhan keluarga dengan segala harta kekayaannya, yang digerakkan oleh jiwa penguasa yang berdaulat. Hukum Negara, menurut George Jellinek, adalah satu-satunya sumber hukum karena itu adalah penciptaan negara dan penampilannya keinginan.

Berdasarkan jabaran tentang Kedaulatan Negara dapat diambil benang merah dimana Pemerintahan sebuah negara yang berdaulat memiliki aturan hukum dan hadir untuk menjamin peri kehidupan dan melindungi seluruh yang ada di dalamnya terhadap berbagai ancaman baik internal maupun eksternal, termasuk tentunya atas berbagai potensi ancaman akibat keberadaan ALKI di tengah gugus kepulauan Indonesia.

---

<sup>4</sup> Doresta Wijaya, David., Mubin, Nurul. (2024) *Teori Kedaulatan Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume. 2 No. 4 November 2024. Hal. 114 - 121

Karenanya, sebuah konsep pertahanan harus dapat diusung. Dengan intensitas pelayaran yang tinggi, kapal-kapal perang dari negara lain dapat dengan mudah memasuki perairan Indonesia. Ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan litoral, baik dari segi teknologi maupun personel, agar dapat merespons ancaman yang mungkin muncul.

**Pertahanan litoral.** Menurut peneliti, pertahanan litoral merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan maritim suatu negara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Prinsip-prinsip dasar dalam pertahanan litoral menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk melindungi wilayah perairan dari berbagai ancaman. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan sistem pertahanan yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika yang ada di laut. Beberapa prinsip penting dari pertahanan litoral menurut peneliti antaranya Integrasi, Deteksi dan respon cepat, serta Prosedur tanggap darurat.

Dalam pertahanan litoral, **Integrasi** menekankan pentingnya kolaborasi dan penggabungan berbagai elemen

pertahanan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pengawasan dan pengendalian wilayah laut. Dalam konteks ini, integrasi mencakup kerjasama antara TNI AL, TNI AD dan TNI AU. Setiap cabang militer memiliki peran dan kemampuan unik yang, jika digabungkan, dapat meningkatkan efektivitas strategi pertahanan secara keseluruhan. Integrasi dilakukan dalam berbagai bentuk dengan **Koordinasi Operasional** sebagai yang terdepan. Dalam situasi krisis atau konflik, koordinasi antara ketiga Matra TNI sangat penting. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran wilayah, angkatan laut dapat segera mengerahkan kapal patroli, sementara angkatan udara dapat memberikan dukungan intelijen dan pengawasan dari udara. Hal ini memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi, sehingga ancaman dapat diatasi dengan lebih efektif.

Demi perkuatan pola integrasi, diperlukan **Pengembangan Kapasitas**. Pengembangan kapasitas disini berfokus pada pengembangan kemampuan pertahanan melalui pola latihan bersama atau gabungan, baik secara parsial maupun gabungan secara utuh. Hal ini demi meningkatkan kesiapsiagaan dan

kemampuan bertindak dalam situasi nyata. Kegiatan ini bermuara pada **Efisiensi Sumber Daya**. Dengan mengintegrasikan berbagai elemen pertahanan melalui pengembangan kapasitas di atas, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Alih-alih setiap cabang militer beroperasi secara terpisah, integrasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam hal anggaran, personel, maupun peralatan.

Muara dari integrasi adalah **Pengawasan Terpadu Terhadap Wilayah Maritim**. Integrasi memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap wilayah laut. Misalnya, penggunaan sistem radar dan satelit oleh TNI AU untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut, yang kemudian dapat dilaporkan kepada TNI AL untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, semua elemen pertahanan dapat beroperasi secara harmonis dan responsif terhadap potensi ancaman.

**Deteksi dan respon cepat** merupakan aspek penting selanjutnya dalam pertahanan litoral yang berfokus pada kemampuan untuk mendeteksi ancaman secara dini dan meresponsnya dengan cepat dan efektif. Dalam konteks

keamanan maritim, kemampuan ini menjadi sangat krusial untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah perairan. Deteksi dini terhadap ancaman maritim, seperti perompakan, penyelundupan, atau intrusi asing, memerlukan sistem pemantauan yang canggih. Penggunaan teknologi modern, seperti radar, satelit, dan drone, memungkinkan pengawasan yang lebih luas dan akurat terhadap aktivitas di laut. Dengan sistem deteksi yang efisien, ancaman dapat diidentifikasi sebelum mencapai titik kritis, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk merespon.

Mencapai deteksi dan respon cepat diperlukan sistem komunikasi yang terintegrasi antar lembaga negara. Informasi yang cepat dan akurat harus dapat disampaikan antar unit untuk memastikan respons yang terkoordinasi. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua elemen pertahanan dapat beroperasi dengan baik dalam situasi darurat. Selain itu, untuk mencapai deteksi dan respon cepat, Indonesia perlu mengadopsi teknologi tinggi dalam sistem pemantauan maritim. Penggunaan radar canggih, satelit, dan drone memungkinkan

pengawasan yang luas dan akurat terhadap aktivitas di laut. Dengan sistem deteksi yang efisien, ancaman dapat diidentifikasi sebelum mencapai titik kritis, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk merespon. Selain itu, penting untuk membangun jaringan komunikasi yang terintegrasi antar lembaga negara, sehingga informasi yang cepat dan akurat dapat disampaikan antar unit untuk memastikan respons yang terkoordinasi.

#### **Prosedur Tanggap Darurat.**

Setiap elemen pertahanan negara harus memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan terlatih. Latihan rutin dan simulasi situasi darurat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua personel siap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan adanya prosedur yang terstandarisasi, respon terhadap ancaman dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini adalah bagian integral penting dalam pertahanan litoral. Setiap elemen pertahanan negara harus memiliki prosedur yang telah distandarisasi untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Latihan rutin (parsial hingga gabungan) dan simulasi situasi darurat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua personel

siap dan mampu bertindak cepat dalam situasi kritis. Dengan adanya prosedur yang jelas, respons terhadap ancaman dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

Aplikasi aspek-aspek pertahanan litoral juga sebagai bentuk manifestasi kesadaran ruang (*space consciousness*) secara utuh dan konsisten dengan tujuan satu kelangsungan dan tetap tegaknya kedaulatan NKRI).<sup>5</sup> Dalam rangka implementasi ketiga aspek tadi, diperlukan strategi sebagai langkah aplikatif hingga penegakkan hukum dan kedaulatan negara. Strategi ini antaranya:

**1. Perkuatan Kemampuan TNI sebagai Garda Terdepan Pertahanan Negara.** Atasnya, langkah awal adalah meningkatkan kapasitas dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini mencakup pengadaan kapal patroli, pesawat pengintai, dan sistem pertahanan udara yang canggih (termasuk yang berkedudukan di darat) untuk memperkuat pengawasan dan respons terhadap ancaman maritim.

Kapal patroli dan pesawat pengintai, apapun bentuknya, merupakan elemen penting utama sebagai penegak kedaulatan serta peneguh kekuatan pertahanan sebuah negara. Keberadaan keduanya menjadi hal fundamental mendasar demi jaminan atas stabilitas pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk disekitar masing-masing ALKI. Sebuah hal mustahil, Indonesia terjamin kedaulatannya ketika kedua elemen pertahanan ini tidak memiliki cukup kekuatan. Keduanya menjadi bagian integral sistem pertahanan canggih, yang secara ideal dapat ditambahkan dengan kemampuan unsur darat (baik yang bernaung di bawah TNI AL maupun TNI AD), seperti kesenjataan intersep statik maupun dinamis yang dapat melakukan penegakkan kedaulatan seperti misalnya rocket atau rudal darat ke udara atau laut.

Langkah strategis selanjutnya adalah memastikan kemampuan pengawasan yang komprehensif. Aplikasi berbagai teknologi deteksi terkini adalah prasyarat mutlak selanjutnya. Untuk itu, pemanfaatan *Automatic Identification System* (AIS) serta data satelit (*Sentinel 1*, *Sentinel 2*, dan *Unseenlabs*) merupakan hal standar yang dapat

---

<sup>5</sup> Zaedun, *Pengantar Geostrategi Indonesia*, 2012, Fhunpatti.com, <https://fh.unpatti.ac.id/pengantar-geostrategi-indonesia/>

dilakukan dengan meletakkan perangkat pembacanya. Selanjutnya adalah melakukan perkuatan *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) adalah sistem pengawasan kelautan yang terpadu yang terdiri dari perangkat penginderaan, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan perangkat

pendukung. IMSS dikembangkan sebagai sebuah sistem operasi berbasis *Information and technology* (IT). Melalui sistem *Coastal Surveillance Station* (CSS) berbasis radar dan radar yang terdapat di unsur KRI mampu mengawasi perairan Indonesia secara optimal.



Gambar 2. Sistem IMSS TNI AL  
Sumber : Dokumentasi Koarmada 1, 2024

Untuk deteksi ruang udara, Satuan Radar (Satrad) yang berkedudukan di berbagai wilayah Indonesia (di bawah anung TNI AD dan TNI AU), harus ditingkatkan kapasitasnya sehingga tidak ada *blind spot* pengawasan wilayah Indonesia.

Selanjutnya diusung program latihan dan pendidikan yang intensif bagi personel TNI. Fokus pada pengembangan kemampuan taktis dan strategis dalam pengelolaan operasi maritim, serta peningkatan keterampilan

dalam penggunaan teknologi modern. Atasnya, di susun kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan penguatan materi di lingkungan TNI sesuai dengan hierarki jenjang kepangkatan yang ada. Muara dari proses latihan dan pendidikan adalah **Latihan Gabungan** untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi situasi krisis (Simulasi skenario pelanggaran wilayah dan ancaman militer harus menjadi bagian dari agenda latihan gabungan).

**2. Penguatan Integrasi Antar Matra Pertahanan.** Selain penguatan kemampuan setiap matra TNI dan upaya integrasi dalam bentuk latihan dan pendidikan, strategi penting kedua adalah perkuatan fungsi Pusat Komando dan Pengendalian Operasi (Puskodalops) terpadu yang mengintegrasikan informasi dari TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Pusat ini berfungsi sebagai otoritas pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi dalam merespons ancaman. Puskodalops terpadu ini berkedudukan secara berjenjang, dari tingkat Markas Besar (Mabes TNI) hingga di bawah naung Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang berkedudukan di 3 titik berbeda.

Kogabwilhan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tertanggal 18 Oktober 2019. Merupakan komando gabungan tiga matra TNI memiliki tugas antaranya sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayah kerjanya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sebagai penangkal apabila terjadi ancaman. Atas dasar ini

Kogabwilhan memiliki tugas untuk mengantisipasi gangguan keamanan nasional dan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kerawanan yang timbul, baik itu potensi ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri, termasuk di dalamnya bertindak sebagai kekuatan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Pada area kerja masing-masing Kogabwilhan inilah terdapat ALKI I, II dan III.

Dengan doktrin **TRI DHARMA YUDHA SAKTI**, yang bermakna utama, "Semangat kerterpaduan pengabdian tiga angkatan atau matra TNI," Kogabwilhan mengembangkan taktik operasi militer dalam rangka menghadapi potensi ancaman keamanan dan Kedaulatan Negara akibat keberadaan ALKI. Operasi dimaksud antaranya:

**a. Taktik Operasi Militer Bidang Pencegahan.** Kogabwilhan dapat mengimplementasikan berbagai langkah taktis pencegahan atau langkah antisipatif dengan memanfaatkan unsur KRI, pesawat dan UAV yang dimiliki TNI. Berikut

adalah taktik yang diusulkan; **Patroli Laut Terpadu dengan unsur KRI dan unsur Udara.** Melaksanakan patroli rutin menggunakan untuk mengawasi perairan di sekitar ALKI dengan langkah taktis; Membuat jadwal patroli yang teratur dan tidak terduga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan; Mengidentifikasi rute patroli yang strategis berdasarkan data intelijen untuk meminimalkan potensi pelanggaran, dan; Mengajak nelayan lokal untuk berperan serta dalam memberikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan di laut; **Penggunaan UAV untuk Pemantauan dan Intelijen.** Memanfaatkan UAV untuk melakukan pemantauan udara dan pengumpulan intelijen di area yang lebih luas dengan singkat. Langkah Taktis yang diusulkan; Menjadwalkan penerbangan UAV secara rutin untuk memantau aktivitas di laut, termasuk pergerakan kapal asing; Pengumpulan Data Real-Time: Menggunakan UAV untuk mengumpulkan data secara real-time dan meneruskannya ke pusat komando untuk analisis cepat, dan;

Melaksanakan operasi pengintaian dengan UAV sebelum dan selama operasi KRI untuk memberikan gambaran situasi yang lebih jelas, dan; **Operasi Gabungan unsur KRI, Pesawat dan UAV.** Mengintegrasikan operasi unsur KRI dengan dukungan pesawat berawak dan UAV untuk meningkatkan efektivitas operasi di laut. Langkah taktis operasi ini; Membangun sistem komunikasi yang efektif antara KRI dan pengendali pesawat berawak atau UAV untuk memastikan informasi dapat dibagikan secara langsung; Menggunakan data dari UAV untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan target penegakkan hukum bagi KRI, seperti kapal asing yang melanggar.

**b. Taktik Operasi Militer Penindakan dan Penegakan Hukum.** Dalam konteks penindakan dan penegakkan hukum di lakukan apabila kendaraan asing keluar dari ALKI (masuk ke laut teritorial). Kogabwilhan Idapat mengimplementasikan beberapa taktik yang efektif dengan memanfaatkan setiap elemen serta unsur pertahanan yang dimiliki

ketiga matra. Untuk itu Kogabwilhan menyusun; **Taktik Respons Cepat.** Kogabwilhan menetapkan prosedur respons cepat ketika terdeteksi adanya pelanggaran atau ancaman di perairan. Untuk itu dibentuk Tim Respons Cepat (TRC) yang terdiri dari unsur KRI yang *stand by* di pelabuhan terdekat ALKI yang memiliki fasilitas logistik memadai. Pesawat berawak dan UAV menjadi unsur intai udara untuk memastikan kedudukan riil pelaku upaya pelanggaran yuridiksi Indonesia. Saat bersamaan unsur KRI yang *stand by* melakukan pelayaran menuju sasaran sesuai petunjuk unsur intai dan perangkat lain penunjang; **Operasi Penindakan Terkoordinasi.** Kogabwilhan melaksanakan operasi penindakan secara terkoordinasi antara KRI dan unsur intai untuk menangkap pelanggar hukum akibat aktifitas tidak terduga yang berasal dari ALKI; **Penegakkan Hukum Berbasis Intelijen.** Kogabwilhan menggunakan intelijen yang akurat untuk mendukung tindakan penegakan hukum di laut. Langkah taktis operasi, serta; **Penangkapan dan Interogasi.** Kogabwilhan

mengembangkan prosedur yang jelas untuk menangkap dan menginterogasi pelanggar hukum.

**3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keamanan Maritim.** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan maritim merupakan langkah strategis yang tidak kalah penting dalam upaya pertahanan negara. Masyarakat yang sadar akan potensi ancaman di perairan akan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif untuk menjelaskan peran masyarakat dalam menjaga keamanan maritim.

Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah mengadakan kampanye kesadaran publik mengenai keamanan maritim. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan workshop yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, pelajar, dan komunitas lokal. Materi kampanye harus mencakup informasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan perairan, cara melaporkan aktivitas mencurigakan, serta dampak negatif dari

kejahatan maritim seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya alam.

Selanjutnya, perlu dibangun saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat harus diberikan akses untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dengan mudah dan cepat. Pembangunan aplikasi mobile atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian secara real-time dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan cara ini, informasi yang diterima oleh aparat keamanan dapat ditindaklanjuti dengan segera, sehingga meningkatkan respons terhadap potensi ancaman.

Selain itu, program pelatihan bagi masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pelatihan ini bisa mencakup teknik pengawasan, penggunaan alat komunikasi, serta pemahaman tentang hukum maritim. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah perairan. Penting untuk melibatkan komunitas nelayan dalam upaya peningkatan kesadaran ini. Nelayan sebagai pihak yang paling sering berinteraksi dengan laut memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Dengan melibatkan mereka dalam program-program keamanan maritim, diharapkan mereka dapat menjadi mitra strategis dalam pengawasan perairan. Selain itu, memberikan insentif kepada nelayan yang aktif melaporkan aktivitas mencurigakan dapat mendorong partisipasi mereka.

Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat harus terus dijaga dan diperkuat. Pertemuan rutin antara semua pihak dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menjaga keamanan maritim. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan maritim tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat terwujud dalam tindakan nyata yang mendukung pertahanan negara, termasuk pada area sekitar ALKI.

## **PENUTUP**

Dalam menghadapi tantangan pertahanan litoral yang dihadapi Indonesia akibat keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), penting bagi negara untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan responsif. Keberadaan ALKI sebagai jalur pelayaran internasional yang bebas dilalui oleh

kapal asing membawa potensi ancaman yang signifikan terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kemampuan TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan integritas wilayah laut Indonesia.

Strategi yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pada pentingnya integrasi antar matra TNI, serta pengembangan sistem deteksi dan respon yang cepat. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan memperkuat kolaborasi antara TNI AL, TNI AD, dan TNI AU, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di perairan. Latihan bersama dan simulasi skenario krisis diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangkasan dalam merespons berbagai ancaman yang mungkin muncul.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap sumber daya alam di perairan Indonesia juga perlu diperkuat untuk mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh kapal asing. Penegakan hukum yang tegas dan diplomasi yang bijaksana akan menjadi landasan penting dalam menjaga kedaulatan maritim. Melalui pendekatan

yang holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat menciptakan sistem pertahanan litoral yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keamanan regional.

Akhirnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan maritim harus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas mencurigakan di perairan dapat menjadi dukungan yang signifikan bagi upaya pertahanan negara. Dengan demikian, melalui sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, Indonesia dapat menghadapi tantangan pertahanan litoral dengan lebih efektif dan menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah lautnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., (2021), *Penegakan Kedaulatan di Laut dan Navigasi Kapal Asing*, <https://law.ui.ac.id/penegakan-kedaulatan-di-laut-dan-navigasi-kapal-asing-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>, Diakses 24 Juni 2025, Pukul 20.30 WIB.
- Budiman, A. (2010), *Pembinaan Wilayah Negara Untuk Kepentingan Pertahanan*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=>

16&mnorutisi=5. Diakses 13 Maret 2025. Pukul 23.15 WIB

Hadisusilo, P., (2022), *Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 15, No. 1, H 49-60.

Hadza, B., (2023), *Luas dan Letak Wilayah Indonesia Berdasarkan Peta*, Yuk Simak, Detik.com, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7069496/luas-dan-letak-wilayah-indonesia-berdasarkan-peta-yuk-simak>, Diakses 16 Februari 2025, Pukul 21.00 WIB.

Hartanto, (2016), *Potensi Ancaman Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka*, Bogor: Tesis Universitas Pertahanan.

Mankowski, R., (2023) *What is Littoral Manoeuvre?*, [Australiaarmyresearchcentre.com, https://researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/](https://researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/). Diakses 13 Maret 2025 Pukul 23.00 WIB

Marbun, V. (2015). *Hak Dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Melakukan Lintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nugroho, S.S. (2019), *Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS di Wilayah Negara Kepulauan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8, No. 2, H. 293-309.

Rosalina, H.N., (2024), *Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Dasar Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang: Disertasi Universitas Islam Sultan Agung.

Rustam, I., (2021), *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 1, H. 1-21.

Wijaya, D. D., Mubin, Nurul. (2024) *Teori Kedaulatan Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume. 2 No. 4 November 2024. Hal. 114 - 121

Zaedun, Z., (2012). *Pengantar Geostrategi Indonesia*, 2012, Fhunpatti.com, <https://fh.unpatti.ac.id/pengantar-geostrategi-indonesia>. Diakses 24 Juni 2025. Pukul 21.00 WIB.